

# PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 214/KA/XI/2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan
  Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 tentang
  Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
  Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - bahwa Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan hukum sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
- 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 201/KA/XI/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
- 8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 9. Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 214/KA/XI/2012 TENTANG **PEDOMAN** PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

#### Pasal I

Mengubah Lampiran Bab VIII Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

# Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 673

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

EKO MADI PARMANTO

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 214/KA/XI/2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

# BAB VIII

#### EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

## A. Persiapan

Sebelum melakukan evaluasi perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- menentukan Tim Evaluasi beserta jangka waktu penugasan dan menerbitkan surat tugas Tim Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2. menyusun program kerja dan pembagian tugas anggota Tim Evaluasi; dan
- 3. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi.

#### B. Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi atas SPIP tingkat Unit Kerja

Evaluasi SPIP tingkat unit kerja menjadi kewenangan Inspektorat yang dilakukan oleh Tim Evaluasi, dilakukan melalui penilaian terhadap kecukupan efektivitas penyelenggaraan unsur dan sub unsur SPIP. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Tim Evaluasi menggunakan contoh daftar uji dengan kriteria sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Contoh Daftar Uji

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
I	UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
а	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		
1	Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik dan pakta integritas) di lingkungan kerja Saudara.	<ul><li>a Sudah ada &amp; dimutakhirkan</li><li>b Sudah ada</li><li>c Sedang disusun</li><li>d Belum ada</li></ul>	
2	Penegakan kode etik telah diterapkan untuk seluruh pegawai di lingkungan kerja Saudara.	<ul><li>a Seluruh pegawai</li><li>b Sebagian besar</li><li>c Sebagian kecil</li><li>d Belum diterapkan</li></ul>	
3	Sudah dibentuk Tim Penegak Kode Etik untuk menangani pelanggaran aturan perilaku.	<ul><li>a Sudah optimal</li><li>b Sudah namun belum optimal</li><li>c Sudah namun belum berfungsi</li><li>d Belum dibentuk</li></ul>	
4	Terdapat laporan terkait pelanggaran Kode Etik beserta tindak lanjutnya.	a Ada, selalu ditindaklanjuti b Ada, sebagian besar ditindaklanjuti c Ada, sebagian kecil ditindaklanjuti d Ada, namun tidak ditindaklanjuti	
b	Komitmen terhadap Kompetensi		
5	Unit Kerja Saudara sudah memiliki standar kompetensi personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.	a Sudah memiliki dan dimutakhirkan b Sudah memiliki c Sedang disusun d Belum memiliki	
6	Pelaksanaan standar kompetensi personil telah diterapkan di lingkungan kerja Saudara.	a Dilaksanakan seluruhnya b Dilaksanakan, sebagian besar c Dilaksanakan, sebagian kecil d Tidak dilaksanakan	
7	Pimpinan Saudara memantau Kompetensi SDM secara efektif.	<ul><li>a Selalu dan terjadwal</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak pernah</li></ul>	
8	Penilaian standar kompetensi personil telah dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap.	<ul> <li>a Dilakukan penilaian, secara periodik dan didokumentasikan</li> <li>b Dilakukan penilaian, tidak secara periodik dan didokumentasikan</li> <li>c Dilakukan penilaian, tidak secara periodik dan tidak didokumentasikan</li> <li>d Tidak ada penilaian</li> </ul>	

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
С	Kepemimpinan yang Kondusif	u.	
9	Nilai kepemimpinan yang kondusif dapat dirasakan dalam lingkungan kerja Saudara.	a b c d	Selalu Sudah, sebagian besar Sudah, sebagian kecil Belum
10	Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan mengkomunikasikannya.	a b c	Sudah, selalu dikomunikasikan Sudah, sebagian besar dikomunikasikan Sudah, sebagian kecil dikomunikasikan Belum
11	Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP untuk mendorong penerapan SPIP.	a b c	Sudah dibentuk dan berfungsi optimal Sudah dibentuk namun belum berfungsi optimal Sudah dibentuk, namun belum difungsikan Belum dibentuk
12	Pimpinan telah menekankan laporan penerapan SPIP dalam setiap kegiatan unit kerja	a b c d	Sudah, semua kegiatan Sudah, sebagian besar kegiatan Sudah, sebagian kecil kegiatan Belum
đ	Struktur Organisasi		
13	Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya.	a b c d	Sudah, seluruhnya Sudah, sebagian besar Sudah, sebagian kecil Belum
14	Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai.	a b c	Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawab pegawai sebagian besar pegawai Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawab sebagian kecil pegawai Belum
15	Uraian tugas untuk masing-masing jabatan telah ditetapkan dan dimutakhirkan.	a b c d	Sudah, seluruhnya dimutakhirkan Sudah, sebagian besar dimutakhirkan Sudah, sebagian kecil dimutakhirkan Belum
16	Unit kerja telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu	a b c d	Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
е	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab		
17	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal.	<ul> <li>a Sudah, ditetapkan dan didokumentasikan</li> <li>b Sudah, ditetapkan tapi tidak didokumentasikan</li> <li>c Sudah, tidak ditetapkan dan tidak didokumentasikan</li> <li>d Belum</li> </ul>	
18	Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai.	<ul><li>a Sangat Setuju</li><li>b Setuju</li><li>c Tidak Setuju</li><li>d Sangat Tidak Setuju</li></ul>	
19	Proses dan tingkatan otorisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	<ul><li>a Rutin</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak Pernah</li></ul>	
20	Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secara rutin membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP.	<ul><li>a Rutin</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak Pernah</li></ul>	
f	Kebijakan yang sehat tentang pengelomanusia	olaan / pembinaan sumber daya	
21	Instansi telah mempunyai kebijakan dan prosedur sejak rekruitmen sampai dengan pemberhentian pegawai.	<ul><li>a Sudah ada dan dimutakhirkan</li><li>b Sudah ada</li><li>c Sedang disusun</li><li>d Belum ada</li></ul>	
22	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah didokumentasikan secara formal.	<ul><li>a Seluruhnya</li><li>b Sebagian besar</li><li>c Sebagian kecil</li><li>d Belum</li></ul>	
23	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut lengkap, telah disosialisasikan, dan dipahami oleh seluruh pegawai.	<ul> <li>a Sudah lengkap, disosialisasikan dan dipahami seluruh pegawai</li> <li>b Sudah lengkap, disosialisasikan tapi belum dipahami seluruh pegawai</li> <li>c Sudah lengkap, belum disosialisasikan dan belum dipahami seluruh pegawai</li> <li>d Belum</li> </ul>	
24	Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan.	<ul><li>a Sudah, seluruh pegawai</li><li>b Sudah, sebagian besar</li><li>c Sudah, sebagian kecil</li><li>d Belum</li></ul>	
25	APIP telah berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi.	<ul><li>a Selalu</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak pernah</li></ul>	

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
g	Perwujudan Peran APIP yang efektif		
26	APIP telah melakukan pengujian keuangan secara periodik	a b c d	Rutin Sering Jarang Tidak pernah
27	APIP telah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	a b c d	Rutin Sering Jarang Tidak pernah
28	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	a b c d	Seluruhnya Sebagian besar Sebagian kecil Belum
h	Hubungan kerja yang baik dengan Ins	tan	si Pemerintah terkait
29	Pimpinan unit kerja telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan teknis operasional.	a b c d	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik
30	Pimpinan unit kerja telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK).	a b c d	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik
31	Pimpinan unit kerja memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan (DJA, DJKN, dan KPPN).	a b c	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik
32	Unit kerja aktif dalam forum kegiatan yang bersifat lintas instansi.	a b c d	Aktif Cukup aktif Kurang aktif Tidak aktif
II.	PENILAIAN RISIKO		
a	Identifikasi Resiko		
1	Identifikasi risiko sudah dilakukan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan unit kerja.	a b c d	Sudah, seluruh kegiatan Sudah, sebagian besar Sudah, sebagian kecil Belum
2	Identifikasi risiko sudah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.	a b c d	Sudah, faktor internal dan eksternal Sudah, namun hanya faktor eksternal Sudah, namun hanya faktor internal Belum

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN
3	Identifikasi risiko sudah menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan yang ingin dicapai unit kerja.	<ul> <li>a Sudah, dengan metode kuantitatif</li> <li>dan kualitatif</li> <li>b Sudah, hanya metode kualitatif</li> <li>c Sudah, hanya metode kuantitatif</li> <li>d Belum</li> </ul>
4	Rekaman identifikasi risiko sudah didokumentasikan.	<ul><li>a Sudah, seluruhnya</li><li>b Sudah, sebagian besar</li><li>c Sudah, sebagian kecil</li><li>d Belum</li></ul>
b	Analisis Risiko	
5	Pimpinan sudah melibatkan pegawai yang berkepentingan untuk menganalisis risiko.	l b   Siidah, sebagian besar
6	Kriteria klasifikasi risiko sudah ditetapkan dan pengelolaan risiko sudah dilaksanakan.	dilaksanakan sebagian c Sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan d Belum ditetapkan
7	Cara mengelola risiko sudah dipantau penerapannya.	<ul> <li>a Dipantau secara periodik dan didokumentasikan</li> <li>b Dipantau secara periodik</li> <li>c Dipantau namun tidak periodik</li> <li>d Belum</li> </ul>
8	Rekaman analisis risiko sudah didokumentasikan.	<ul><li>a Sudah, seluruhnya</li><li>b Sudah, sebagian besar</li><li>c Sudah, sebagian kecil</li><li>d Belum</li></ul>
III.	KEGIATAN PENGENDALIAN	
а	Reviu atas Kinerja Unit Kerja	
1	Pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.	I b   Sering
2	Pimpinan unit kerja secara berkala melakukan pemantauan kinerja unit kerja.	In I Sering
3	Pimpinan melakukan reviu kinerja unit kerja secara berkala.	a Selalu b Sering c Jarang d Tidak Pernah

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN
4	Laporan Kinerja organisasi dilaporkan tepat waktu dan didokumentasikan dengan baik.	<ul><li>a Dilaporkan, tepat waktu</li><li>b Jarang terlambat</li><li>c Sering terlambat</li><li>d Tidak melaporkan</li></ul>
b	Pembinaan SDM	
5	Pengawasan pimpinan atas kinerja pegawai dilakukan secara berkesinambungan.	<ul><li>a Selalu</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak Pernah</li></ul>
6	Pimpinan unit kerja melakukan kaderisasi dan pelatihan untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.	<ul><li>a Selalu</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak Pernah</li></ul>
7	Pimpinan membangun kerjasama antar pegawai.	<ul><li>a Selalu</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak Pernah</li></ul>
8	Evaluasi Kinerja dilakukan untuk semua pegawai	<ul> <li>a Dilakukan untuk seluruh pegawai</li> <li>b Dilakukan untuk sebagian besar pegawai</li> <li>c Dilakukan untuk sebagian kecil pegawai</li> <li>d Belum dilakukan</li> </ul>
С	Pengendalian atas Pengelolaan Sister	n Informasi
9	Adanya rencana pengendalian atas pengelolaan keamanan sistem informasi di unit kerja Saudara.	<ul> <li>Ada dan dilaksanakan seluruhnya</li> <li>Ada namun hanya dilaksanakan sebagian</li> <li>Ada namun tidak dilaksanakan</li> <li>Tidak ada</li> </ul>
10	Pelaksanaan pengendalian atas pengelolaan keamanan sistem informasi di unit kerja Saudara sudah optimal.	a Pengendalian dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mampu mengelola keamanan sistem informasi b Pengendalian hanya dilakukan saat terjadi masalah c Pengendalian yang dilakukan belum optimal d Tidak ada pengendalian
11	Dibentuk fungsi khusus/tim untuk melaksanakan pengendalian atas pengelolaan keamanan sistem informasi di unit kerja Saudara.	<ul> <li>a Sudah berfungsi dengan optimal</li> <li>b Sudah berfungsi tapi belum optimal</li> <li>c Ada tapi belum berfungsi</li> <li>d Belum ada</li> </ul>
12	Pimpinan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian keamanan sistem informasi di unit kerja Saudara.	a Selalu b Sering c Jarang d Tidak Pernah

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
d	Pengendalian Fisik atas Aset		
13	Terdapat kebijakan atau prosedur dari pimpinan yang mengatur tentang pengendalian untuk keamanan fisik atas aset (seperti uang tunai, surat berharga, persediaan dan peralatan lainnya).	dilaksanakan semua pegawai b Ada bentuk tertulis, belum dikomunikasikan ke pegawai	
14	Fasilitas atau aset penting diamankan, dikendalikan secara ketat, dan dibatasi akses nya.	b   Ada namun sebagian kecil pegawai	
15	Dibentuk fungsi khusus/tim yang bertanggungjawab melaksanakan pengendalian fisik atas aset atau fasilitas penting di lingkungan kerja Saudara.	b Sudah berfungsi tapi belum optimal	
16	Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian fisik atas aset atau fasilitas penting di lingkungan kerja Saudara	a Selalu b Sering	
е	Penetapan dan Reviu atas Indikator (	dan ukuran Kinerja	
17	Ukuran dan indikator kinerja sudah ditetapkan untuk tingkat kegiatan dan pegawai.	<ul> <li>a Sudah ditetapkan seluruhnya</li> <li>b Sudah, sebagian besar</li> <li>c Sudah, sebagian kecil</li> <li>d Belum</li> </ul>	
18	Dilakukan validasi atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.		
19	Penilaian pengukuran kinerja dievaluasi secara periodik.	c Dievaluasi setiap tahun d Tidak pernah	
20	Data capaian kinerja dibandingkan secara terus menerus dengan perencanaannya dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.	b Sering	
21	Kebijakan mengenai pemisahan fungsi sudah dibuatkan SK Pimpinan.	<ul><li>a Selalu</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak Pernah</li></ul>	

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
f	Pemisahan Fungsi		
22	Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan diantara pegawai yang berbeda terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.	a b c d	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah
23	Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya <i>check</i> and <i>balance</i> s	a b c d	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah
24	Pimpinan memantau pelaksanaan tugas masing-masing fungsi secara rutin	a b c d	Selalu Sering Jarang Tidak pernah
g	Otorisasi atas transaksi dan kejadian	yar	ng penting
25	Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan.	a b c	Seluruh pengendalian dilaksanakan Ada pengendalian namun sebagian dilaksanakan Ada pengendalian namun tidak dilaksanakan Tidak ada pengendalian
26	Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya pegawai yang memiliki otoritas yang melakukan transaksi dan kejadian penting keuangan.	a b c d	Pengendalian dilaksanakan dan sesuai dengan otoritasnya Pengendalian dilaksanakan namun belum sesuai dengan otoritasnya Ada pengendalian namun belum dilaksanakan Tidak ada pengendalian
27	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinan dan pegawai.	a b c d	Selalu Sering Jarang Tidak pernah
28	Otorisasi atas transaksi dan kejadian sejalan dengan arahan pimpinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a b c d	Selalu Sering Jarang Tidak pernah

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN
29	Transaksi dan kejadian keuangan diklasifikasikan dengan tepat.	a Seluruh transaksi sesuai klasifikasi b Sebagian besar sesuai klasifikasi c Sebagian kecil sesuai klasifikasi d Tidak tepat
h	Pencatatan yang Akurat dan Tepat W	aktu atas transaksi dan kejadian
30	Transaksi dan kejadian keuangan dicatat dengan tepat waktu sehingga tetap relevan.	a Seluruh transaksi tepat waktu b Sebagian besar tepat waktu c Sebagian kecil tepat waktu d Tidak tepat waktu
i	Pembatasan Akses atas Sumber Daya	dan Pencatatannya
31	Pembatasan akses ke sumber daya untuk mengendalikan risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan.	a Telah ada pembatasan akses ke seluruh sumber daya b Sebagian besar telah ada pembatasan akses c Sebagian kecil telah ada pembatasan akses d Tidak ada pembatasan akses
32	Pencatatan akses ke sumber daya dilakukan oleh pegawai yang berwenang.	<ul><li>a Selalu dicatat</li><li>b Sebagian besar dicatat</li><li>c Kadang-kadang dicatat</li><li>d Tidak ada pencatatan</li></ul>
33	Penetapan pembatasan akses ke penyimpanan sumber daya direviu dan dipelihara secara periodik.	<ul> <li>a Ada, dan telah direviu secara periodik</li> <li>b Ada, namun belum direviu secara periodik</li> <li>c Ada, namun belum pernah direviu</li> <li>d Belum ada</li> </ul>
34	Dalam menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat Pimpinan telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan.	a Selalu mempertimbangkan b Sering mempertimbangkan c Kurang mempertimbangkan d Tidak mempertimbangkan
j	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya	dan Pencatatannya
35	Petugas pengelola BMN didukung dengan SK Pimpinan.	a Telah didukung SK Pimpinan b Tidak didukung SK Pimpinan
36	Tugas dan tanggungjawab terkait penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan BMN dilakukan sesuai ketentuan	a Selalu sesuai ketentuan b Sebagian besar sesuai ketentuan c Sebagian kecil sesuai ketentuan d Tidak sesuai ketentuan

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
37	Penyimpanan dan pencatatan BMN direviu secara periodik dan dipelihara	a Direviu secara periodik b Sering direviu c Jarang direviu d Belum direviu	
38	Petugas BMN membuat dan mengirimkan laporan dengan tepat waktu	a Membuat laporan dan mengirim tepat waktu b Membuat laporan tapi mengirim tidak selalu tepat waktu c Membuat laporan tapi tidak mengirimkan laporan d Belum membuat laporan	
k	Dokumentasi yang baik atas Sistem dan kejadian penting	n Pengendalian Intern serta transaksi	
39	Terdapat dokumentasi tertulis atas pengendalian pada tingkatan kegiatan	a Semua didokumentasikan b Sebagian besar didokumentasikan c Sebagian kecil didokumentasikan d Tidak didokumentasikan	
40	Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat	<ul> <li>a Didokumentasikan dengan lengkap dan akurat</li> <li>b Didokumentasikan, lengkap tapi tidak akurat</li> <li>c Didokumentasikan, tidak lengkap d Tidak didokumentasikan</li> </ul>	
41	Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis	<ul> <li>a Didokumentasikan dalam bentuk cetak dan elektronis</li> <li>b Didokumentasikan dalam bentuk elektronis</li> <li>c Didokumentasikan dalam bentuk cetak</li> <li>d Tidak didokumentasikan</li> </ul>	
42	Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala.	<ul> <li>a Dikelola dan dipelihara, serta dimutakhirkan secara berkala</li> <li>b Dikelola dan dipelihara, namun dimutakhirkan secara insidentil</li> <li>c Dikelola dan dipelihara, namun tidak dimutakhirkan</li> <li>d Tidak dikelola, tidak dipelihara dan tidak dimutakhirkan</li> </ul>	
IV	INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
а	Informasi		

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN
1	Informasi internal yang penting dalam mencapai tujuan unit kerja, termasuk faktor- faktor keberhasilan yang kritis, sudah diidentifikasi dan secara teratur dilaporkan kepada Pimpinan.	a Diidentifikasi dan dilaporkan secara teratur b Diidentifikasi dan dilaporkan tidak teratur c Diidentifikasi namun tidak dilaporkan d Tidak diidentifikasi dan tidak dilaporkan
2	Pimpinan disemua tingkatan telah memperoleh informasi internal dan eksternal yang diperlukan.	a Sudah, informasi internal dan eksternal b Sudah, hanya informasi eksternal c Sudah, hanya informasi internal d Belum memperoleh informasi
3	Informasi sudah disediakan dalam bentuk rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan Pimpinan.	<ul> <li>a Seluruh informasi sudah sesuai</li> <li>b Sebagian besar informasi sudah sesuai</li> <li>c Sebagian kecil informasi sudah sesuai</li> <li>d Belum sesuai</li> </ul>
4	Apakah informasi disajikan tepat waktu agar memungkinkan dilakukannya tindakan korektif secara cepat?	<ul><li>a Selalu tepat waktu</li><li>b Sering tepat waktu</li><li>c Jarang tepat waktu</li><li>d Tidak tepat waktu</li></ul>
b	Penyelenggaraan Komunikasi yang E	fektif
5	Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi kepada atasan langsungnya, dan Pimpinan bersedia mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen.	a Memiliki, Pimpinan bersedia mendengar keluhan b Memiliki, Pimpinan tidak bersedia mendengar keluhan c Memiliki, tidak pernah digunakan d Tidak memiliki
6	Adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) jika pegawai melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.	a Ada jaminan tertulis dan sudah dilaksanakan b Ada jaminan yang tertulis namun belum ada pegawai yang melaporkan c Ada jaminan, namun belum tertulis d Belum ada jaminan
7	Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit kerja, ditindaklanjuti dengan baik	<ul> <li>a Selalu ditindaklanjuti</li> <li>b Sering ditindaklanjuti</li> <li>c Jarang ditindaklanjuti</li> <li>d Tidak pernah ditindaklanjuti</li> </ul>

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN
8	Pimpinan berkomunikasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan terus melaporkan kepada APIP mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya.	a Selalu berkomunikasi b Sering berkomunikasi c Jarang berkomunikasi d Tidak pernah berkomunikasi
v	PEMANTAUAN	
а	Pemantauan Berkelanjutan	
1	Pimpinan mempunyai strategi pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern.	a Mempunyai, efektif untuk menilai efektivitas pengendalian intern b Mempunyai, cukup efektif untuk menilai efektivitas pengendalian intern c Mempunyai, namun belum efektif untuk menilai efektivitas pengendalian intern d Belum mempunyai strategi pemantauan
2	Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus ditelusuri.	<ul> <li>a Sudah dibandingkan secara berkala dan sudah ditelusuri jika ada selisih</li> <li>b Sudah dibandingkan secara berkala namun belum ditelusuri jika ada selisih</li> <li>c Sudah dibandingkan namun belum secara berkala</li> <li>d Belum dibandingkan</li> </ul>
3	Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern.	<ul><li>a Selalu</li><li>b Sering</li><li>c Jarang</li><li>d Tidak pernah</li></ul>
4	Setiap rekomendasi untuk perbaikan Pengendalian yang disampaikan oleh internal auditor dan eksternal auditor telah dilaksanakan dan dipantau.	a Seluruh rekomendasi dilaksanakan dan dipantau b Sebagian besar rekomendasi dilaksanakan, dan dipantau c Sebagian kecil rekomendasi dilaksanakan dan dipantau d Rekomendasi tidak dilaksanakan
b	Evaluasi Terpisah	
5	Rencana evaluasi telah disusun untuk meyakinkan bahwa suatu kegiatan dilaksanakan sesuai SOP.	<ul> <li>a Ada, sudah dimutakhirkan</li> <li>b Sudah ada</li> <li>c Sedang disusun</li> <li>d Belum ada</li> </ul>

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN
6	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan melibatkan APIP atau auditor eksternal.	a Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian sesuai yg disyaratkan, serta melibatkan APIP atau auditor eksternal b Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian yang belum sesuai dengan yang disyaratkan, namun melibatkan APIP atau auditor eksternal c Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian yang sudah sesuai dengan yang disyaratkan d Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian yang belum sesuai dengan yang disyaratkan
7	Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya.	a Kelemahan dikomunikasikan kepada orang yang sesuai tanggungjawabnya dan atasan langsungnya b Kelemahan dikomunikasikan kepada orang yang sesuai tanggungjawabnya c Kelemahan dikomunikasikan kepada orang yang tidak sesuai tanggungjawabnya d Kelemahan tidak dikomunikasikan
8	Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius dilaporkan ke pimpinan unit kerja	a Selalu dilaporkan b Sering dilaporkan c Jarang dilaporkan d Tidak pernah dilaporkan

Pendekatan evaluasi dengan menggunakan skor terhadap seluruh unsur dan sub unsur SPIP yang diberi bobot nilai sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Unsur, Sub Unsur dan Bobot Nilai

NO	UNSUR SPIP	BOBOT NILAI	SUB UNSUR SPIP			
1	Lingkungan	30 %	1.1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengendalian	JU 70	1.2. Komitmen terhadap kompetensi (4%)			
	rengendanan		1.3. Kepemimpinan yang kondusif (4%)			
			1.4. Pembentukan Struktur Organisasi yang			
			sesuai kebutuhan (3%)			
			1.5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (4%)			
			1.6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM (4%)			
			1.7. Peran APIP yang efektif (4%)			
			1.8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait (3%)			
2	Penilaian Risiko	20 %	2.1. Identifikasi Risiko (10%)			
			2.2. Analisis Risiko (10%)			
3	Kegiatan Pengendalian	25 %	3.1. Reviu atas kinerja Instansi yang bersangkutan (3%)			
			3.2. Pembinaan SDM (2%)			
			3.3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem			
			Informasi (2%)			
			3.4. Pengendalian fisik atas Aset (2%)			
			3.5. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan			
			ukuran Kinerja (2%)			
			3.6. Pemisahan fungsi (4%)			
			3.7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting (2%)			
			3.8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat			
			Waktu atas transaksi dan kejadian (2%)			
			3.9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (2%)			
			3.10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya			
			dan Pencatatannya (2%)			
			3.11. Dokumentasi yang baik atas Sistem			
			Pengendalian Intern serta transaksi			
			dan kejadian penting (2%)			
4	Informasi dan	10 %	4.1. Informasi (5%)			
	Komunikasi		4.2. Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif (5%)			
5	Pemantauan	15 %	5.1. Pemantauan berkelanjutan (10%)			
			5.2. Evaluasi Terpisah (5%)			
	TOTAL	100 %	- ' '			

Capaian penyelenggaraan SPIP pada tingkat unit kerja secara keseluruhan dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

Rentang Skor	Klasifikasi	Keterangan				
90 < Skor ≤ 100	Sangat Baik	Dokumen/bukti pendukung sesuai				
		standar, disosialisasikan dan				
		diimplementasikan.				
75 < Skor ≤ 90	Baik	Dokumen/bukti pendukung sesuai				
		standar, disosialisasikan namun belun				
		diimplementasikan.				
60 < skor ≤ 75	Dokumen/bukti pendukung belum					
		sesuai dengan standar.				
Rentang Skor	Klasifikasi	Keterangan				
50 < skor ≤ 60	Kurang	Belum ada dokumen/bukti pendukung				
Skor ≤ 50	Sangat kurang	Belum dilaksanakan				

Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

- a. mengumpulkan informasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja dengan melakukan wawancara kepada pemegang posisi kunci (*key person*) dan Satuan Tugas/Satgas SPIP unit kerja dengan menggunakan daftar uji sebagai petunjuk (*guidance*);
- b. melakukan observasi dengan melihat dokumen/bukti pendukung;
- melakukan analisis dengan cara membandingkan kondisi yang ada yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan kriteria dalam daftar uji;
- d. menetapkan skor kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja; dan
- e. membuat kesimpulan hasil evaluasi.

#### 2. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kegiatan

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) tingkat Kegiatan dilakukan oleh Inspektorat untuk mengidentifikasi kualitas pengendalian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi dilaksanakan terhadap kegiatan unit kerja yang telah dilakukan penilaian risiko dan mempunyai rancangan pengendalian yang tercantum dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Evaluasi SPI tingkat kegiatan dilakukan tanpa skor dan simpulan hasil evaluasi diberikan dalam bentuk kualitatif yang mengungkapkan tingkat kecukupan pengendalian pada kegiatan yang dievaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pada tingkat kegiatan, evaluator tidak perlu melakukan pengumpulan informasi melalui daftar uji, evaluator lebih banyak melakukan prosedur reviu dokumen, wawancara dan observasi.

Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi tingkat kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengumpulan Informasi Umum
  - mendapatkan informasi umum mengenai rancangan pengendalian internal, diantaranya dengan mempelajari Dokumen Rencana Strategis dan Laporan Audit Kinerja;
  - 2) memahami sasaran kegiatan yang ada pada unit kerja untuk mengidentifikasi kegiatan penting;
  - 3) mengidentifikasi proses bisnis/operasional (bussiness process) yang dilaksanakan dalam mencapai kegiatan melalui dokumen Rencana Strategis atau Standar Operasional Prosedur kegiatan bersangkutan;
  - 4) mendapatkan dokumen pengendalian, diantaranya kebijakan atau ketentuan terkait kegiatan, Standar Operasional Prosedur kegiatan, bagan alur, dan *output* kegiatan;
  - 5) melakukan observasi lapangan atau *walkthrough* agar dapat mengkonfirmasi pemahaman dan menilai apakah dokumentasi proses yang digambarkan dalam bagan arus telah sesuai dengan rancangan dalam bagan arus tersebut; dan
  - 6) memilih kegiatan yang akan diuji.

#### b. Melakukan Analisis

- 1) melakukan analisis kegiatan yang signifikan dihubungkan dengan proses bisnis;
- 2) mengidentifikasi risiko;
- 3) mengidentifikasi rancangan pengendalian (*Test of Design*).

  Evaluator dapat memilih pengendalian kunci (*key control*)

yang paling tepat dalam rangka mendeteksi kelemahan atau mencegah risiko yang ada sebagai penyebab kegiatan menjadi tidak efisien, efektif atau taat aturan. Cara menilai efektivitas pengendalian sebagai berikut:

- a) bandingkan antara pengendalian yang ada pada Rencana Tindak Pengendalian dengan kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan perbandingan ini, evaluator dapat menilai seberapa besar kesenjangan yang ada; dan
- b) analisis juga keberadaan pengendalian lain yang dapat menutupi kesenjangan tersebut.

Untuk melakukan analisis dapat digunakan media tabel sebagaimana tersaji pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Tabel Analisis

Nama kegiatan: xxxx

Tujuan	No	Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Pengendali an yang ada (RTP)	Kondisi di lapangan	Penilaian			
						E	KE	TE	Ket

#### 4) Melakukan penilaian dan penyimpulan efektivitas desain

Berdasarkan tabel 3 di atas, evaluator dapat melakukan analisis kecukupan desain atau rancangan pengendalian dengan menilai per sub kegiatan. Penyimpulan penilaian efektivitas desain bersifat konservatif, dengan pengkategorian sebagai berikut:

#### a) Efektif

Jika dalam suatu kegiatan terdapat beberapa pengendalian kunci yang secara dominan efektif mencegah atau mengendalikan risiko, maka desain pengendalian tingkat kegiatan disimpulkan efektif.

# b) Kurang Efektif

Jika dalam suatu kegiatan terdapat beberapa

pengendalian kunci yang secara dominan kurang efektif mencegah atau mengendalikan risiko, sementara terdapat pengendalian lain yang sudah efektif maka desain pengendalian tingkat kegiatan disimpulkan kurang efektif.

# c) Tidak Efektif

Jika dalam suatu kegiatan terdapat satu saja pengendalian kunci yang secara dominan tidak efektif mencegah atau mengendalikan risiko, maka desain pengendalian atas kegiatan tersebut disimpulkan tidak efektif.

# 5) Melakukan pengujian atas implementasi pengendalian (*Test of Control*)

Pengujian atas implementasi pengendalian dilakukan dengan menguji bukti-bukti yang menunjukan proses pengendalian tersebut. Tujuan dari pengujian pengendalian adalah untuk melihat apakah pengendalian yang telah dirancang berfungsi sesuai yang diharapkan dan apakah personel yang menjalankan pengendalian tersebut memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif.

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian pengendalian sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi efektivitas rancangan pengendalian dan memilih pengendalian yang akan diuji;
- b) menentukan jumlah populasi transaksi;
- c) menentukan jumlah sampel; dan
- d) melakukan penilaian.

#### c. Kesimpulan efektivitas pengendalian tingkat kegiatan

Kesimpulan atas efektivitas pengendalian tingkat kegiatan dikaitkan dengan hasil penilaian capaian kinerja dengan kategori sebagai berikut:

## 1) Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat mencegah atau mengendalikan risiko yang akan terjadi, serta capaian kinerja kegiatannya adalah diatas 90%.

# 2) Kurang Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan belum sesuai untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja kegiatannya adalah diatas 75% s.d 90%.

# 3) Tidak Efektif

Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan tidak efektif untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja kegiatannya adalah sampai dengan 75% ke bawah.

# C. Pelaporan

Inspektorat menyusun hasil evaluasi SPIP tingkat unit kerja dan kegiatan ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP yang berisi kesimpulan dan saran perbaikan terhadap unsur-unsur SPIP yang belum memadai dan rancangan kegiatan pengendalian yang tidak efektif agar dapat menjadi perbaikan pada waktu yang akan datang. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP disampaikan ke unit kerja yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama dan Deputi Atasan Langsung Unit Kerja.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT,

DAN KERJA SAMA

EKO MADI PARMANTO